



2025

LKPJ
DINAS
PARIWISATA



KATA PENGANTAR

ALHAMDULILLAHIRABBIL 'ALAMIIN, puji syukur kehadiran ALLAH yang telah memberikan hidayah dalam hati dan fikiran sehingga LAKjP 2024 ini dapat disusun sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Tujuan penyusunan LAKjP 2024 adalah untuk meberi gambaran capaian kinerja yang telah ditorehkan di dalam kegiatan sepanjang tahun 2024 mengacu pada Dokumen Perencanaan, yaitu RPD dan Renstra OPD. Selanjutnya, hasil evaluasi dari LKjIP yang disusun akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan penyusunan rencana program dan kegiatan di masa mendatang

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penyusunan LAKjP 2024 ini. Apresiasi kepada semua jajaran Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat yang telah bekerja maksimal di tahun 2024 sehingga capaian target Indikator Kinerja dapat terealisasi dengan optimal. Sepenuhnya disadari bahwa LKjIP ini masih jauh dari kesempurnaan dan semoga semua pihak dapat memberi saran konstruktif. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam menentukan kebijakan pembangunan di Sulawesi Barat khususnya di bidang pariwisata dan semoga kita senantiasa dilindungi oleh ALLAH. Amin

Mamuju, Januari 2025
Kepala Dinas,

Hj. Darmawati, S.Pi.,MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. : 19720713 200003 2 003

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat, dalam menyelenggarakan tugas secara profesional, bersih dan akuntabel, bersandar pada sejumlah regulasi yang mengatur pelayanan sektor kepariwisataan. Undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata adalah regulasi nasional yang menjadi patron kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat di negeri Malaqbiq ini.

Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik di daerah dipertegas oleh lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan perundang - undangan tersebut telah menyempurnakan regulasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem SAKIP tidak saja menekankan pada *output* (keluaran) sebuah kegiatan, tetapi lebih menekankan pada *outcomes* (hasil), dengan demikian, maka dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) penekanan pada hasil kegiatan sangat perlu mendapat perhatian. LKjIP sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan Tahunan yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sangat tepat dipakai sebagai salah satu tolak ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.

Untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan prioritas pembangunan, Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama. Menurut Tim Penilai LKjIP Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, penyusunan IKU wajib bagi unit kerja berdasarkan pada Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah. IKU merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan dapat diketahui melalui proses evaluasi dan pelaporan sebagai bagian integral dari akuntabilitas kinerja program sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sehingga pengukuran dan penilaian terhadap *output* dan *outcomes* program kegiatan pembangunan dengan menggunakan alat ukur yang tepat, jelas, terukur dan legitimate merupakan langkah strategis membangun akuntabilitas dan citra publik pemerintah.

Berdasarkan hasil pengukuran, diperoleh pengakuan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, apakah pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi dan nepotisme, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 Nomor 28 Tahun 1999. Berkaitan hal tersebut, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan di

Bidang Kepariwisata Sulawesi Barat yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat tahun 2019 sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2024. Penyusunan laporan ini selain untuk menginformasikan mengenai proses dan hasil pencapaian tujuan serta sasaran, juga menjelaskan tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapai, selanjutnya diharapkan LKjIP merupakan bahan perbaikan sistem dan penyelenggaraan manajemen kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat di masa mendatang, antara lain melalui perbaikan penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar, mulai dari perencanaan kinerja hingga kepada evaluasi kinerja, serta pengembangan nilai-nilai akuntabilitas di lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

- I. Tugas Pokok
Melaksanakan sebagian tugas gubernur menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Industri Pariwisata, Kelembagaan dan Kemitraan Pariwisata
 - II. Fungsi
 1. penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis urusan bidang pemasaran pariwisata, industri pariwisata, destinasi pariwisata, sarana prasarana, kemitraan, kelembagaan dan Litbang kepariwisataan;
 2. penyelenggaraan perencanaan dan monitoring urusan Pemasaran pariwisata, industri pariwisata, destinasi pariwisata, sarana prasarana, kemitraan, kelembagaan dan Litbang kepariwisataan;
 3. penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas urusan Pemasaran pariwisata, industri pariwisata, destinasi pariwisata, sarana prasarana, kemitraan, kelembagaan dan Litbang kepariwisataan
 4. merencanakan teknis, struktur, dan standar pembinaan kepariwisataan; menyelenggarakan pembinaan teknis bidang
-

- Pemasaran, Pengembangan Destinasi, Industri dan Kelembagaan Pariwisata lintas kabupaten/kota;
5. penyelenggaraan urusan Pemerintah dan pelayanan Umum meliputi, bidang Pemasaran, Pengembangan Destinasi, Industri Pariwisata dan Kelembagaan;
 6. perumusan standar operasional Dinas Pariwisata, yang meliputi bidang Pemasaran, Pengembangan Destinasi, Industri dan Kelembagaan Pariwisata;
 7. pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional; pendayagunaan bantuan; dan pengawasan, penggunaan sarana dan prasarana kepariwisataan;
 8. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan bidang Kepariwisata yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat, yang meliputi bidang Pemasaran, Pengembangan Destinasi, Industri dan Kelembagaan Pariwisata,
 9. mengembangkan koordinasi dan kemitraan pembangunan kepariwisataan pada tingkat kab/kota, nasional maupun internasional;
 10. menyelenggarakan pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pariwisata;
 11. pembinaan dan penyelenggaraan tugas kepariwisataan meliputi bidang Pemasaran, Pengembangan Destinasi, Industri Pariwisata dan Kelembagaan;
 12. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

III. Kondisi SDM (Sumber Daya Manusia)

Sampai dengan akhir tahun 2024, jumlah pegawai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 45 orang.

Berdasarkan komposisi dan jumlah Personil Lingkup Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat tahun 2024, tergambar sebagai berikut :

Tabel 1.1
Komposisi dan Jumlah Personil

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Pegawai Negeri Sipil	45
	JUMLAH	45

Sumber : Dispar Provinsi Sulawesi Barat, 2024

Komposisi jabatan Pegawai berdasarkan Golongan Ruang Lingkup Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat, sampai dengan tahun 2024 terdata sebagai berikut :

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Dan Golongan

NO	JABATAN	JUMLAH (Orang)		JUMLAH (ORANG)
		PEREMPUAN	LAKI-LAKI	
1	KEPALA DINAS		1	1
2	SEKRETARIS DINAS/KEPALA BIDANG / UPTD	3	2	5
3	KEPALA SEKSI/KEPALA SUBBAGIAN	1	0	1
4	FUNGSIONAL UMUM/STAF	17	21	20
TOTAL		21	24	45

Sumber : Dispar Provinsi Sulawesi Barat, 2024

Komposisi Personil berdasarkan jabatan dan kualifikasi pendidikan Lingkup Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN						JUMLA
		S3	S2	S1	D3	D2	SLTA	H
1	Kepala Dinas	-	1	-	-	-	-	1
2	Sekretaris	-	1	-	-	-	-	1
3	Kepala Bidang/UPTD	-	3	1	-	-	-	4
4	Kepala Seksi/Subbag	-	0	1	-	-	-	1
5	Staf / Pelaksana	-	9	17	3	-	9	38
TOTAL		-	14	19	3	-	9	45

Sumber : Dispar Provinsi Sulawesi Barat, 2024

- a. Jumlah pegawai yang masih sangat kurang dan belum mampu memenuhi kebutuhan setiap bidang khususnya bagian fungsional umum, akibatnya banyak pegawai yang memiliki beban kerja lebih dari dua;
- b. Kuantitas/Jumlah sumber daya manusia /pegawai proporsional dengan beban kerja tidak proporsional dan tingkat kemampuan teknis/ keterampilan sesuai bidang tugas belum memadai, dalam hal ini kurangnya kemampuan penguasaan teknologi informasi, pengalaman kerja yang masih minim, manajemen pemasaran serta kemampuan berbahasa asing yang masih sangat terbatas;
- c. Kualitas sumber daya manusia banyak yang belum sesuai dengan latar belakang pendidikan, pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan;

C. ISU STRATEGIS

Isu strategis yang paling mendasar untuk pelaksanaan pembangunan kepariwisataan dapat dirincikan sebagai berikut :

1. Sarana transportasi udara yang tersedia belum direct atau langsung dari Jakarta, masih transit via Makassar sehingga menambah cost atau biaya transportasi menuju Mamuju sebagai ibukota provinsi
 2. Pemindahan ibu kota Negara ke Kalimantan Timur yang akan menjadi peluang baru dalam peningkatan kunjungan wisatawan ke Sulawesi Barat
 3. Pandemi covid-19 yang mengubah paradigma kepariwisataan yang akan lebih cenderung ke format virtual atau digital
-

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Pada dasarnya, Dinas tidaklah memiliki visi dan misi secara independent. Idealnya, Dinas teknis mengejewantahkan visi dan misi Gubernur dalam domain kerja Dinas. Dalam hal ini Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat berupaya menerjemahkan sasaran dan target kinerja Gubernur, Bapak H. M. Ali Baal Masdar, sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Sulawesi Barat 2017-2024. Terjemahan visi dan misi gubernur, dilakukan dalam uraian dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017-2024.

Dalam telaahan visi dan misi Gubernur Sulawesi Barat berikut diuraikan sebuah kajian faktor-faktor eksternal dan internal yang faktor penghambat dan penguatan dalam proses pemberdayaan Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat dari sisi internal, kekuatan sektor yang ditangani oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat adalah: dukungan pemimpin yang cukup besar, struktur organisasi dan pembagian tugas yang jelas, serta adanya kerjasama aparatur antar lini. Sedangkan kelemahan yang dijumpai adalah belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, aksesibilitas menuju kawasan wisata yang belum memadai, belum optimalnya upaya pengembangan serta rendahnya kualitas ASN yang menangani sektor Kepariwisata.

Kemudian dari sisi eksternal, adapun bentuk peluang dalam pengembangan sektor yang ditangani adalah potensi Kepariwisata Provinsi Sulawesi Barat yang cukup besar, kondisi sosial masyarakat yang cukup kondusif serta kondisi keamanan yang baik. Sedangkan bentuk ancaman dari luar adalah adanya persaingan yang ketat, paket perjalanan wisata yang minim, serta kurang minat wisatawan yang berkunjung ke wilayah tengah Indonesia.

Dengan adanya analisa ini, maka tergambar dalam Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat, diuraikanlah visi dan misi sebagai upaya penyelesaian atas persoalan-persoalan yang dihadapi oleh pemerintah dalam melaksanakan pengembangan sektor kepariwisataan. Uraian visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat periode 2017-2024 yang dituangkan dalam RPJMD Sulawesi Barat.

Visi “**Sulawesi Barat Maju dan Malaqbiq**”.

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Sulawesi Barat Maju : Sejalan dengan propinsi maju lainnya di Indonesia terkhusus di kawasan timur Indonesia dengan mendorong 3 aspek pembangunan yaitu : Maju dari aspek pendidikan, kesehatan dan pendidikan masyarakat; Maju dalam pengelolaan tata pemerintahan yang bersih dan profesional; Maju dalam pengembangan infrastruktur daerah serta pengelolaan Sumber Daya Alam yang optimal.

Sulawesi Barat Malaqbiq “didefinisikan” Masyarakatnya Malaqbiq, dalam arti berpengetahuan, berketerampilan, berbudaya dan religius; Alam dan lingkungan yang Malaqbiq, serta dikelola dengan baik dan profesional untuk kesejahteraan rakyat dan Malaqbiq dalam berhubungan dunia luarnya dan Provinsi lainnya

dalam jejaringnya kuat dan dihormati sehingga dipercaya dengan tujuan untuk membangun Sulbar yang lebih maju.

Dengan adanya misi, maka pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menuangkan misi dalam 5 (Lima) point, sebagai langkah strategis untuk mencapai visi di atas. Berikut uraian misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat:

1. **Membangun Sumber daya Manusia Berkualitas, Berkepribadian dan Berbudaya.** yaitu Sumber Daya Manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Pelaku dan sifatnya dilakukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya.
 2. **Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Modern dan Terpercaya.** yaitu kondisi pemerintahan yang para pelaku yang terlibat di dalamnya menjaga diri dari perbuatan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).Perekonomian Sulawesi Barat yang semakin maju dan berdaya saing, bersinergi antar skala usaha, berbasis ekonomi pertanian dan non pertanian yang mampu menarik investasi dalam dan luar negeri, menyerap banyak tenaga kerja, serta memberikan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
 3. **Membangun dan Memperkuat Konektivitas antar Wilayah Berbasis Unggulan Strategis.** yaitu Penguatan konektivitas nasional merupakan salah satu strategi yang ditempuh dalam rangka percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, terdapat tiga prinsip konsep konektivitas. Pertama, memaksimalkan pertumbuhan melalui kesatuan kawasan, bukan keseragaman (inclusive development) dengan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan. Kedua, memperluas pertumbuhan
-

melalui konektivitas wilayah-wilayah melalui *inter-moda supply chain system* yang menghubungkan *hinterland* dan yang tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan. Ketiga, mencapai pertumbuhan inklusif dengan menghubungkan daerah terpencil dengan infrastruktur dan pelayanan dasar dalam mendapatkan manfaat pembangunan.

4. **Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inovatif dan Berdaya Saing Tinggi.** yaitu Pertumbuhan Ekonomi adalah peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi masyarakat tanpa adanya perubahan “teknologi” produksi itu sendiri. Harrod – Domar mengemukakan syarat-syarat yang diperlukan agar pertumbuhan ekonomi dapat tumbuh dan berkembang dengan mantap atau steady growth dalam jangka panjang pada semua variabel seperti output, tabungan, investasi, dan kemajuan teknologi. Pembangunan ekonomi adalah kenaikan output yang disebabkan oleh adanya inovasi dari para pelaku ekonomi, inovasi ini berarti adanya perbaikan dalam arti luas. Misalnya adanya penemuan produk baru ataupun penemuan pasar baru.
 5. **Mengarusutamakan Lingkungan Hidup untuk Pembangunan Berkelanjutan.** yaitu kesatuan dan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam bentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
-

Sebagai wujud dari hierarki kinerja yang menangani sektor Kepariwisata maka orientasi “Mewujudkan Provinsi Sulawesi Barat Sebagai Destinasi Wisata Nasional Berkelas Dunia, Berkelanjutan, Berbasis Pada Potensi Kearifan Lokal, Yang Mendorong Pembangunan Daerah, Kesejahteraan Masyarakat dan Malaqbi”.

Adapun sebagai point penjabaran dari orientasi capaian Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat adalah:

1. Meningkatkan daya saing Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat baik pada tingkat nasional maupun global sehingga mampu meningkatkan jumlah kunjungan.
2. Menjadikan Pariwisata sebagai wahana pemberdayaan Masyarakat, meningkatkan kreatifitas, penciptaan dan pemerataan kesempatan kerja dan berusaha.
3. Mengembangkan daerah tujuan wisata di Sulawesi Barat yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah dan Masyarakat.
4. Mendorong kemajuan daerah secara merata melalui optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan potensi wisata serta pengembangan kerjasama antar daerah dan kemitraan antar pelaku dalam pengelolaan Pariwisata.

Berbagai target pengembangan yang dikemas dalam bentuk tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat. juga menjadi arah dan acuan bagi Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat dalam melaksanakan dan mengintervensi sektor Kepariwisata

Tujuan pertama dalam pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat terkait dengan sektor Kepariwisata maka tujuan pengembangannya adalah meningkatkan pengembangan Destinasi

Pariwisata, Industri Pariwisata, kualitas Promosi Pariwisata serta Meningkatkan kapasitas SDM Pariwisata yang berkompeten dan Profesional pada Lembaga dan Mitra pariwisata serta Pelaku Ekonomi Kreatif. Sasaran dari tujuan ini adalah meningkatnya kunjungan wisatawan di Sulawesi Barat.

Terdapat beberapa indikator yang ditetapkan di dalam renstra dinas pariwisata yang merupakan ukuran atau indikator kinerja utama dalam rangka pencapaian target dinas pariwisata provinsi Sulawesi barat.

Tabel. 2.1 Indikator Kinerja Pada Dinas Pariwisata tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	2	3
1	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Aparatur Lingkup OPD	Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai
2	Meningkatnya Pengelolaan Tata Laksana Lingkup OPD	Nilai SAKIP Lingkup OPD
3	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Lingkup OPD	Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD
6	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik dan mancanegara	Persentase Kunjungan Wisata
7	Meningkatnya kontribusi PDRB sektor pariwisata	Persentase PDRB sektor pariwisata

B. PERJANJIAN KINERJA

Sebagai sajian awal dari sub perjanjian kinerja ini, terlebih dahulu akan diekspos kembali terkait perjanjian kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat tahun 2024. Indikator Kinerja ini tidak terlepas dari target-target Indikator Kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat yang telah ditetapkan dalam RPJMD Sulbar (2017-2024).

Tabel. 2.2 Perjanjian Kinerja 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Aparatur Lingkup OPD	Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai	100%
2	Meningkatnya Pengelolaan Tata Laksana Lingkup OPD	Nilai SAKIP Lingkup OPD	B
3	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Lingkup OPD	Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD	98%
6	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik dan mancanegara	Persentase Kunjungan Wisata	90%
7	Meningkatnya kontribusi PDRB sektor pariwisata	Persentase PDRB sektor pariwisata	0,29%

Berikut penjelasan singkat terkait Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja tahun 2024 Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat.

a. INDIKATOR SASARAN 1

Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai

Pelayanan Prima terkait dengan kinerja aparatur yang terdiri dari keseluruhan ASN Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat. Cara memperoleh nilai dari perhitungan target dan realisasi indikator ini adalah persentase dari semua ASN pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat yang menempati posisi sesuai pembagian pekerjaan.

b. INDIKATOR SASARAN 2

Nilai SAKIP lingkup OPD

Nilai SAKIP diperoleh dari hasil penilaian APIP dalam review tahunan yang dilaksanakan terhadap semua OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

a. INDIKATOR SASARAN 3

Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD

Persentase dari realisasi penggunaan anggaran sesuai SPJ fungsional yang ada di data Badan Pengelola Keuangan Daerah

b. INDIKATOR SASARAN 4

Persentase Kunjungan Wisata.

Kunjungan wisatawan adalah perhitungan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Sulawesi Barat selama tahun 2024. Terdapat berbagai pendekatan dalam perhitungan jumlah kunjungan wisatawan, seperti Hotel, Rumah Makan, Kunjungan ke tempat Wisata dan penggunaan transportasi selama tahun 2024.

c. INDIKATOR SASARAN 5

Persentase PDRB sektor Pariwisata

Persentase PDRB sektor pariwisata merupakan hasil perhitungan PDRB sektor usaha akomodasi dan makan minum yang dibandingkan dengan total PDRB secara keseluruhan di Provinsi Sulawesi Barat

Target kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat yang tertuang dalam perjanjian kinerja tahun 2024. Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat tak lain merupakan acuan dan qirah Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pengembangan sektor Kepariwisataan di Sulawesi Barat. Target ini tidak terlepas dari rencana kerja yang telah dibreakdown dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat tahun 2024.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan media untuk menguraikan hasil pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai keberhasilan, kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi, serta langkah – langkah antisipatif yang akan diambil oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat kedepannya. Pada bab ini akan diuraikan capaian target kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang telah disusun di awal tahun 2024.

A. CAPAIAN KINERJA

Evaluasi dan analisis atas capaian sasaran kinerja dikaitkan dengan indikator kinerjanya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun ini

Perbandingan ini menunjukkan target dan realisasi kinerja Dinas Pariwisata Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Realisasi Tahun ini. Adapun Perbandingan Target dan Realisasi dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.2 Capaian kinerja tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN 2024		
			SATUAN	TARGET	REALISASI
1.	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Aparatur Lingkup OPD	Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai	%	100 %	100 %
2.	Meningkatnya Pengelolaan Tata Laksana Lingkup OPD	Nilai SAKIP Lingkup OPD	NILAI	B	BB

3.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Lingkup OPD	Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD	%	98 %	98,6 %
4.	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik dan mancanegara	Persentase Kunjungan Wisata	%	9 %	7 %
5.	Meningkatnya kontribusi PDRB sektor pariwisata	Persentase PDRB sektor pariwisata	%	0,24 %	0,24 %

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian tahun ini dengan tahun lalu dengan beberapa tahun terakhir

Dalam bagian ini dijelaskan antara realisasi kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir yang diperoleh dari LKjIP tahun Kemaring. Berikut ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3 : Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian tahun ini dengan tahun lalu.

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	
		2023	2024
1.	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Aparatur Lingkup OPD	100 %	100 %
2.	Meningkatnya Pengelolaan Tata Laksana Lingkup OPD	B	BB

3.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Lingkup OPD	97 %	98,6 %
4.	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik dan mancanegara	12 %	7 %
5.	Meningkatnya kontribusi PDRB sektor pariwisata	0,23 %	0,24 %

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/Penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Adapun beberapa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

a. INDIKATOR SASARAN 1

Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai

Pelayanan Prima terkait dengan kinerja aparatur yang terdiri dari keseluruhan ASN Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat. Cara memperoleh nilai dari perhitungan target dan realisasi indikator ini adalah persentase dari semua ASN pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat yang menempati posisi sesuai pembagian pekerjaan.

b. INDIKATOR SASARAN 2

Nilai SAKIP lingkup OPD

Nilai SAKIP diperoleh dari hasil penilaian APIP dalam review tahunan yang dilaksanakan terhadap semua OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

Berdasarkan hasil review APIP pada tahun 2024 atas AKIP Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat ALHAMDULILLAH diperoleh nilai BB untuk SAKIP Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat.

c. INDIKATOR SASARAN 3

Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD

Persentase dari realisasi penggunaan anggaran sesuai SPJ fungsional yang ada di data Badan Pengelola Keuangan Daerah telah dicapai dengan nilai 98,6 %. Capaian ini tentunya adalah hasil kerja keras tim Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya walaupun dengan berbagai kendala yang ada termasuk terjadinya banjir dan longsor di tahun 2024.

d. INDIKATOR SASARAN 4

Persentase Kunjungan Wisata.

Kunjungan wisatawan adalah perhitungan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Sulawesi Barat selama tahun 2024. Terdapat berbagai pendekatan dalam perhitungan jumlah kunjungan wisatawan, seperti Hotel, Rumah Makan, dan Kunjungan ke tempat Wisata selama tahun 2024, dengan perolehan senilai 7 % peningkatan dimana diperoleh dari perbandingan jumlah kunjungan wisatawan tahun 2024 terhadap tahun 2023.

e. INDIKATOR SASARAN 5

Persentase PDRB sektor Pariwisata

Persentase PDRB sektor pariwisata merupakan hasil perhitungan PDRB sektor usaha akomodasi dan makan minum yang

dibandingkan dengan total PDRB secara keseluruhan di Provinsi Sulawesi Barat

Berdasarkan hasil rilis resmi BPS awal tahun 2024 untuk data tahun 2024 maka diperoleh perhitungan PDRB sektor pariwisata yang didasarkan pada sektor akomodasi makan minum dengan nilai 0,24 %

B. REALISASI ANGGARAN

Setelah menyajikan realisasi indikator kinerja utama di atas maka berikut akan disajikan data realisasi keuangan pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat tahun 2024. Belanja Daerah TA 2024 dianggarkan senilai Rp. 12,350,812,970 dengan alokasi belanja gaji Rp. 4,254,659,687 dan belanja operasi senilai Rp. 8,096,153,283. Adapun realisasi dari pagu Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat pada akhir tahun anggaran adalah:

Tabel 3.4 : Realisasi Anggaran

NO	URAIAN	PAGU	REALISASI
1	Belanja Gaji	4,254,659,687	4,211,082,205
2	Belanja Operasi	8,096,153,283	7,975,334,267
Jumlah		12,350,812,970	12,186,416,472

Dengan rincian alokasi dana pada program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.5 Realisasi anggaran 2024

Kode Akun	Nama Akun	Nilai Dana	Realisasi		% FISIK TERTIMBANG
			Rp.	%	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6,211,357,382	6,129,292,654	98.68	100.00
3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	298,821,051	273,339,500	91.47	100.00
3.26.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	174,895,631	149,950,000	85.74	100.00
3.26.01.1.01.01.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	37,608,100	38,928,100	103.51	100.00
3.26.01.1.01.01.01.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	20,620,200	20,620,000	100.00	100.00
3.26.01.1.01.01.01.02	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9,985,020	9,945,000	99.60	100.00
3.26.01.1.01.01.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	12,340,200	11,130,300	90.20	100.00
3.26.01.1.01.01.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,663,400	1,500,000	40.95	100.00
3.26.01.1.01.01.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39,708,500	36,830,800	92.75	100.00
3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,425,834,687	4,225,400,390	95.47	100.00
3.26.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,254,659,687	4,211,082,205	98.98	100.00
3.26.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4,054,100	3,000,000	74.00	100.00
3.26.01.1.02.02.01	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	51,600,500	51,400,000	99.61	100.00
3.26.01.1.02.02.02	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3,897,500		-	100.00
3.26.01.1.02.02.03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,050,000	2,100,000	51.85	100.00
3.26.01.1.02.02.04	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	44,850,500	17,457,000	38.92	100.00
3.26.01.1.02.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	62,722,400	52,862,400	84.28	100.00
3.26.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	155,740,641	152,442,934	97.88	100.00
3.26.01.1.05.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	8,411,900	8,250,000	98.08	100.00
3.26.01.1.05.02	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	147,328,741	144,192,934	97.87	100.00
3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	470,651,980	436,366,730	92.72	100.00
3.26.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9,379,000	5,227,000	55.73	100.00
3.26.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3,565,900	13,650,000	382.79	100.00
3.26.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7,972,900	6,241,000	78.28	100.00
3.26.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10,000,000	12,458,000	124.58	100.00
3.26.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19,582,000	12,935,000	66.06	100.00
3.26.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13,863,360	42,000,000	302.96	100.00
3.26.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	41,571,540	29,016,880	69.80	100.00
3.26.01.1.06.08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	364,717,280	314,838,850	86.32	100.00
3.26.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	190,722,695	189,710,100	99.47	100.00
3.26.01.1.07.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	167,431,295	166,455,600	99.42	100.00
3.26.01.1.07.02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23,291,400	23,254,500	99.84	100.00
3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	540,942,880	452,619,275	83.67	100.00
3.26.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	76,044,000	81,061,700	106.60	100.00
3.26.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	63,412,880	40,787,575	64.32	100.00
3.26.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	401,486,000	330,770,000	82.39	100.00
3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	196,985,000	76,210,750	38.69	100.00
3.26.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	196,985,000	76,210,750	38.69	100.00
3.26.02.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	449,657,640	448,014,440	99.63	100.00
3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	54,789,480	54,789,300	100.00	100.00
3.26.02.1.01.01	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	54,789,480	54,789,300	100.00	100.00
3.26.02.1.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	207,523,140	124,662,500	60.07	100.00
3.26.02.1.02.01	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	207,523,140	124,662,500	60.07	100.00
3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	187,360,300	194,486,640	103.80	100.00
3.26.02.1.03.01	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	26,843,560	36,603,900	136.36	100.00
3.26.02.1.03.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	160,516,740	157,882,740	98.36	100.00
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1,627,028,008	1,624,046,480	99.82	100.00
3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1,296,800,000	1,506,096,480	116.14	100.00
3.26.03.1.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	64,800,000	64,799,750	100.00	100.00
3.26.03.1.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1,135,000,000	1,364,172,830	120.19	100.00
3.26.03.1.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	97,000,000	77,123,900	79.51	100.00
3.26.04.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	2,923,269,940	2,919,368,858	99.87	100.00
3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	1,875,000,000	2,899,728,958	154.65	100.00
3.26.04.1.01.01	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	980,000,000	1,473,245,640	150.33	100.00
3.26.04.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	605,000,000	604,169,518	99.86	100.00
3.26.04.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	290,000,000	822,313,800	283.56	100.00
3.26.05.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1,139,500,000	1,065,694,040	93.52	100.00
3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	289,500,000	717,839,040	247.96	-
3.26.05.1.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	100,000,000	385,881,430	385.88	
3.26.05.1.01.02	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	125,000,000	267,562,010	214.05	
3.26.05.1.01.03	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	64,500,000	64,395,600	99.84	
REALISASI KEGIATAN		12,350,812,970	12,186,416,472	98.67	100.00

Dari table di atas dapat diuraikan bahwa realisasi keseluruhan dari belanja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat TA 2024 adalah dengan realisasi 98,6 %.

Di tahun kedua pencapaian target berdasarkan Dokumen Perencanaan Sulawesi Barat, Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat telah berupaya Semaksimal mungkin. Meluangkan waktu untuk berfikir dan bekerja secara professional demi mewujudkan target-target indikator yang telah ditetapkan. Namun, manusia berencana dan Tuhan yang menentukan. Hasil yang jauh dari target bukan berarti tak ada segurat usaha di dalamnya. Usaha selalu ada meski benturan keterbatasan pagu dan pembiayaan urusan harus beradu pada prioritas setiap tahun. Tak pernah ada usaha yang sia-sia. Semoga dengan usaha selama ini target Kepariwisataaan dapat tercapai sempurna pada tahun mendatang.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil evaluasi Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat dapat melaksanakan program yang telah ditetapkan dalam Rencana kerja tahun 2024 dengan tingkat keberhasilan yang optimal yakni mencapai 98 % serapan anggaran dengan kinerja capaian di atas 100 %. Capaian kinerja organisasi yang belum maksimal karena antara lain:

1. Belum memadainya sumber daya aparatur khususnya bidang teknis Pariwisata baik dari segi kualitas maupun kuantitas;
2. Terbatasnya anggaran yang tersedia untuk Pengembangan Pariwisata;
3. Refocusing anggaran dan terbatasnya ruang gerak operasional kegiatan;

Untuk mengantisipasi masalah – masalah yang dihadapi, langkah– langkah yang akan dilakukan oleh Dinas Pariwisata diantaranya:

1. Mengoptimalkan sumber daya yang ada dengan pembagian tugas dan tanggung jawab secara kolektif sehingga ada fungsi kontrol bagi setiap Aparatur pada bidang tugas masing – masing;
2. Meningkatkan kinerja aparatur dengan mengikuti diklat – diklat yang akan menunjang operasional kegiatan;
3. Melakukan pengembangan objek Pariwisata unggulan dan menyediakan fasilitas yang memadai bagi wisatawan;

Demikian Laporan Kinerja Instansi pemerintah ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas pariwisata Provinsi Sulawesi Barat dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2024 dan dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.
